



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASIM SAPUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **824373**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.400.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 175.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.325.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>66.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>499.900.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>51.000.000</b>



Sub Total	Rp.	3.171.900.000
III. HUTANG	Rp.	735.404.983
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.436.495.017

---

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.